



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.526747/2020**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 20 Tahun 2019 tentang APBN TA 2020

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) |
| 3. Provinsi | : (07) | SUMATERA UTARA |
| 4. Kode>Nama Satker | : (526747) | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN |
| Sebesar | : Rp. | 43.450.000 (EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)
005.05.09.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

	Jumlah Uang
	Rp. 43.450.000
	Rp. 43.450.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	43.450.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|----------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN M E D A N II | (123) Rp. | 43.450.000 |
|----------------------|-----------|------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

JAKARTA, 12 November 2019
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526747/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0152-0415-1608-0488

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (526747) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Kuasa Pengguna Anggaran : MARY IRDANNA NAINGGOLAN, S.E. Ak., S.H., M.H
Bendahara Pengeluaran : SARIA, S.H
Pejabat Penanda Tangan SPM : ANDRIAS, S.E

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN			43.450.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN			43.450.000
2 Program	005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)			43.450.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan, Cepat, Biaya Ringan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Kinerja Program	01	Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan Tepat Waktu, Sidang keliling	3044	Perkara	
	02	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan Tepat Waktu	3067	Perkara	
	03	Perkara yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44	Perkara	
	04	Masyarakat Penerima Layanan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara	8640	Jam Layanan	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
Indikator Output Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer Termasuk Penyelesaian Perkara Yang Kurang dari 5 (lima) bulan	3044	Perkara	
	02	Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	3067	Perkara	
	03	Perkara Yang di Selesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	44	Perkara	
	04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	8640	Jam Layanan	
Kegiatan	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			43.450.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan tertib Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan TUN			
	02	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN			
	03	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara			
	04	Dukungan Penyelesaian Perkara			
	05	Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Hukum dan Administrasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Output Kegiatan	1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	172 Perkara		11.000.000
Indikator Output Kegiatan	01	Dukungan Penyelesaian Perkara Peradilan TUN	3067	Perkara	
Output Kegiatan	1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara [PN]	1 Perkara		650.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Prodeo	44	Perkara	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526747/2020
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:0152-0415-1608-0488

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (526747) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Kuasa Pengguna Anggaran : MARY IRDANNA NAINGGOLAN, S.E. Ak., S.H., M.H
Bendahara Pengeluaran : SARIA, S.H
Pejabat Penanda Tangan SPM : ANDRIAS, S.E

Halaman : IA.2

Output Kegiatan	1059.003	Pos Bantuan Hukum [PN]	288 Jam Layanan	31.800.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN	8640 Jam Layanan	

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526747/2020
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0152-0415-1608-0488

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (526747) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN	-	43.450	-	-	-	43.450		
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	-	43.450	-	-	-	43.450		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	43.450	-	-	-	43.450		
1059.001	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang tepat waktu	-	11.000	-	-	-	11.000	07 . 51	
01	RM	-	11.000	-	-	-	11.000	123	
1059.002	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara [PN]	-	650	-	-	-	650	07 . 51	
01	RM	-	650	-	-	-	650	123	
1059.003	Pos Bantuan Hukum [PN]	-	31.800	-	-	-	31.800	07 . 51	
01	RM	-	31.800	-	-	-	31.800	123	
JUMLAH		-	43.450	-	-	-	43.450		

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilimlun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526747/2020
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0152-0415-1608-0488

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (526747) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

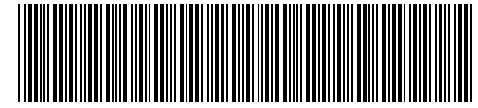
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	526747	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	400	886	1.556	2.381	2.503	2.781	4.827	4.697	5.092	5.197	5.818	7.312	43.450
		52 BELANJA BARANG	400	886	1.556	2.381	2.503	2.781	4.827	4.697	5.092	5.197	5.818	7.312	43.450
	005.05.09.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	400	886	1.556	2.381	2.503	2.781	4.827	4.697	5.092	5.197	5.818	7.312	43.450
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	400	886	1.556	2.381	2.503	2.781	4.827	4.697	5.092	5.197	5.818	7.312	43.450
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.497	2.489	29.956
		- PNPB (425232)	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	133	1.574
		- PNPB (425233)	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.277	15.390
		- PNPB (425239)	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.083	1.079	12.992

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badililmuntun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526747/2020
IV A. B L O K I R**



DS:0152-0415-1608-0488

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [526747] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

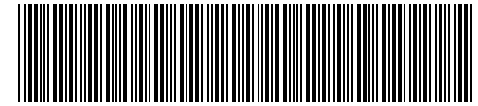
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020
NOMOR : DIPA- 005.05.2.526747/2020
IV B. C A T A T A N**



DS:0152-0415-1608-0488

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [526747] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

JAKARTA, 12 November 2019
Direktur Jenderal Badilmitun

ttd.
Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.
NIP 196305081988032002